



**ANALISIS DAMPAK MEKANISME KEBIJAKAN TRANSMISI MONETER  
TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA DASAR KREDIT  
PADA BANK PEMERINTAH DAN BANK SWASTA DI INDONESIA  
PERIODE JANUARI 2014 – SEPTEMBER 2019**

**Faiq Permadi Zuffar<sup>1)</sup>, Dadan Rahadian<sup>2)</sup>**  
**Universitas Telkom**

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

*Dikirim : 03 September 2020  
Revisi pertama : 07 September 2020  
Diterima : 14 September 2020  
Tersedia online : 01 Oktober 2020*

*Kata Kunci: Kebijakan Moneter, SBDK,  
Suku Bunga, Metode VAR*

*Email : [zuffarfaiq@gmail.com](mailto:zuffarfaiq@gmail.com)<sup>1)</sup>,  
[dadanrahadian@telkomuniversity.ac.id](mailto:dadanrahadian@telkomuniversity.ac.id)<sup>2)</sup>*

*Kebijakan moneter digunakan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin pada tingkat inflasi. Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan Bank Indonesia sebagai instrument untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian Indonesia. Optimalnya perubahan suku bunga pada Bank Swasta maupun Pemerintah tiap periode harus sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia pada periode yang sama. Namun dalam faktanya, terjadi time lag saat BI merubah kebijakannya. Data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data SBDK dan data BI Rate. Metode analisis penelitian ini menggunakan model VAR.*

*Hasil menunjukkan time lag pada Bank Pemerintah maupun swasta berbeda-beda. Besaran time lag pada Bank Pemerintah pada SBDK Korporasi adalah 21 periode, Ritel 24 periode, Mikro 23 periode, KPR 14 periode dan Non KPR 12 periode. Besaran time lag pada bank swasta pada SBDK Korporasi adalah 23 periode, Ritel 21 periode, Mikro 22 periode, KPR 5 periode, dan Non KPR 17 periode.*

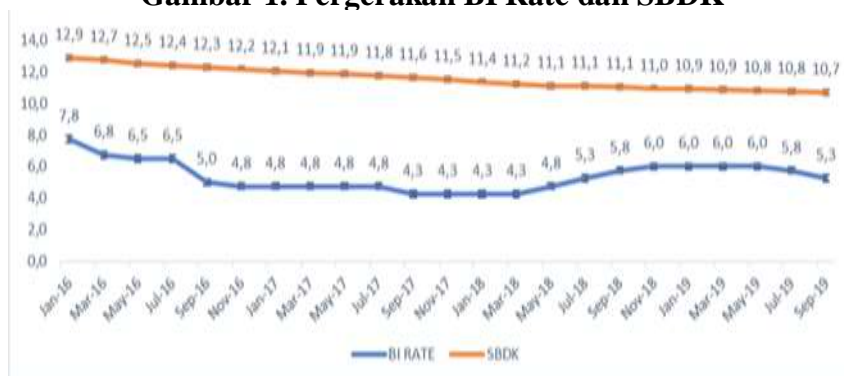
## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Menurut Hasibuan (2013), mekanisme transmisi kebijakan moneter didefinisikan sebagai jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional dan laju perubahan harga. Mekanisme transmisi kebijakan moneter secara umum dapat didefinisikan sebagai upaya Pemerintah dalam hal moneter untuk mengatur kondisi perekonomian agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7DRR atau *BI rate* sebagai instrument untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian Indonesia. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah menetapkan *BI Rate* yang mana akan mempengaruhi SBDK.

Suku bunga dasar kredit atau *Prime Lending Rate* adalah suku bunga dasar paling rendah di mana Bank belum menghitung premi resiko dari kredit tersebut. SBDK sendiri memiliki beberapa jenis. Di Indonesia pada umumnya memiliki 5 jenis yang di peruntukan untuk bisnis yang berbeda. Jenis SBDK di Indonesia yaitu Korporasi, Ritel, Mikro, KPR, dan Non KPR. Pada perubahan nilai suku bunga dasar kredit pada bank Pemerintah maupun swasta, optimalnya perubahan tersebut sesuai dengan pergerakan dari suku bunga Bank Indonesia pada saat itu juga. Namun faktanya sesuai dengan saat Bank Indonesia memutuskan untuk merubah Suku Bunga Bank Indonesia bank-bank konvensional tidak dapat merubah suku bunga nya pada saat itu juga atau dapat dikatakan terjadi *time lag* perubahan suku bunga.

**Gambar 1. Pergerakan BI Rate dan SBDK**



Sumber: Data yang telah dialah Penulis (2019)

Gambar 1 menunjukkan bahwa suku bunga kredit bergerak secara fluktuatif. Pergerakan suku bunga kredit dapat dipengaruhi oleh *BI Rate* dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank atau dapat disebut BOPO Darna, (2012). Letak dari SBDK akan selalu diatas dari BI Rate, karena SBDK adalah cara dari perbankan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih BI Rate dengan SBDK.

Pada perubahan nilai suku bunga dasar kredit pada bank Pemerintah maupun swasta, optimalnya perubahan tersebut sesuai dengan pergerakan dari suku bunga Bank Indonesia pada saat itu juga. Namun faktanya sesuai dengan Gambar 1, saat Bank Indonesia memutuskan untuk merubah Suku Bunga Bank Indonesia bank-bank konvensional tidak dapat merubah suku bunga nya pada saat itu juga atau dapat dikatakan terjadi *time lag* perubahan suku bunga.

*Time lag* yang dimaksud adalah waktu yang dibutuhkan untuk perbankan dalam mengubah nilai suku bunga kreditnya dalam menyesuaikan dengan perubahan dari *BI Rate*. Besaran *time lag* dapat dihitung dalam satuan periode bulan maupun minggu. Dalam menghitung besaran *time lag* dapat dihitung menggunakan metode VAR. Alfian (2011) menjelaskan dalam model VAR setiap variabel dianggap simetris, karena sulit menentukan secara pasti apakah suatu variabel bersifat eksogen atau endogen. Karena secara individual koefisien didalam model VAR sulit diinterpretasikan maka untuk memudahkan untuk melihat besaran *time lag* dapat menggunakan *Impulse Respons*.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka didapatkan pertanyaan penelitian berupa:

1. Apakah terdapat perbedaan *time lag* saat perubahan suku bunga kredit pada Bank Pemerintah dan Swasta?
2. Berapakah besaran *time lag* perubahan tingkat suku bunga kredit pada Bank Pemerintah?
3. Berapakah besaran *time lag* perubahan tingkat suku bunga kredit pada Bank Swasta?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *time lag* saat perubahan suku bunga kredit pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta
2. Untuk mengetahui seberapa besarkah *time lag* perubahan tingkat suku kredit bunga kredit pada Bank Pemerintah
3. Untuk mengetahui seberapa besarkah *time lag* perubahan tingkat suku bunga kredit pada Bank Swasta

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Moneter**

Menurut UU No. 3 Tahun 2004, kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar (*JUB*) dan suku bunga (*BI Rate / Repo Rate*). Sedangkan Budiyantri (2014) memaparkan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Menurut Hasibuan,(2013) Kebijakan moneter juga dapat diartikan sebagai kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Jadi kesimpulannya, kebijakan moneter adalah

kebijakan yang dilakukan oleh aparat negara demi untuk menjaga kestabilan nilai mata uang di pasar.

### **Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter**

Menurut Hasibuan, (2013) Mekanisme transmisi kebijakan moneter didefinisikan sebagai jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional dan laju perubahan harga. Sedangkan menurut Magdalena, (2014) Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan suatu proses dimana suatu kebijakan yang dibuat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam suatu negara. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan.

### **BI 7 DRR / BI Rate**

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate*, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate (bi.go.id). BI rate alias suku bunga Bank Indonesia (BI) merupakan kebijakan moneter (keuangan) yang ditetapkan BI setiap bulannya. Instrumen *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen *BI 7-Day Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.

### **Suku Bunga Dasar Kredit / SBDK**

Menurut Ramadhani (2015), suku bunga dasar kredit pada dasarnya merupakan suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi bank dalam penentuan suku bunga kredit dan terdiri atas tiga komponen, yakni rata-rata harga pokok dana untuk kredit, biaya *overhead* yang dikeluarkan bank dalam proses pemberian kredit, serta margin keuntungan yang ditetapkan bank untuk aktivitas perkreditan namun belum memperhitungkan komponen premi risiko individual nasabah bank. SBDK antar bank satu dengan lainnya berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. SBDK dipengaruhi oleh BI 7 DRR dan biaya operasional bank atau dapat disebut BOPO (Darna, 2012). Besarnya bunga kredit merupakan salah satu bentuk persaingan untuk menyalurkan kredit perbankan sebanyak mungkin. Oleh karenanya semakin murah suku bunga dasar kredit yang ditetapkan oleh suatu bank akan mendorong masyarakat untuk memperoleh kredit / pinjaman dari bank yang bersangkutan. Dalam penerapannya SBDK belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.

Jenis suku bunga kredit di Indonesia di bagi menjadi 5, yaitu :

1. SBDK Korporasi
2. SBDK Ritel
3. SBDK Mikro
4. SBDK KPR
5. SBDK Non KPR

**Metode VAR**

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian model VAR. Dalam model ini setiap masing masing variabel diasumsikan simetris, karena sulit menentukan secara pasti apakah masing masing variabel tersebut bersifat eksogen atau endogen. Karena secara individual koefisien didalam model VAR sulit diinterpretasikan para ahli ekonometrika menggunakan *Impulse Respons* (Widardjono, 2009) Teknik analisis yang digunakan adalah properties model *Vector Auto Regression* (VAR), yaitu *Impulse Response Function* (IRF).

Dalam menggunakan program Eviews 10 Aplikasi model VAR mensyaratkan beberapa pengujian, antara lain: Uji Stasioneritas, Penentuan Lag Optimal, Uji Kausalitas Granger serta uji stabilitas. Indikator efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter diukur dengan:

1. Berapa kecepatan atau berapa jumlah tenggat waktu (*time lag*);
2. Berapa kekuatan variabel-variabel pada masing-masing jalur transmisi. Indikator tersebut diperoleh dari hasil Uji IRF

**Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian kali ini akan membahas mengenai *time lag* yang dibutuhkan terjadi ketika kebijakan moneter dilakukan dan akan berpengaruh kepada perubahan SBDK Korporasi, SBDK Ritel, SBDK Mikro, SBDK KPR, dan SBDK Non KPR. Hal hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah *BI Rate* dimana *Rate* ini akan berpengaruh terhadap SBDK. Pada kondisi optimal, penyesuaian SBDK dengan *BI Rate* tidak memerlukan waktu lama. Namun dalam pergantian atau tranmisi Suku Bunga Dasar kredit untuk menyesuaikan dengan *BI Rate* membutuhkan waktu (*time lag*). Untuk jelasnya akan dijabarkan pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data yang telah dialah Penulis (2019)

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini metode penelitian kuantitatif dengan tujuan deskriptif yang bersifat komparatif. Analisis data bersifat kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Berdasarkan tipe penyelidikannya, penelitian ini menggunakan metode eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

### **Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan subjek Bank Pemerintah dan Bank Swasta. Sampel pada penelitian ini yaitu Bank Swasta dan Bank Pemerintah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2019 dan memiliki 5 jenis SBDK. Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada September 2019 hingga Juni 2020.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan menghasilkan 7 sampel Bank yang terdiri dari 3 Bank Swasta dan 4 Bank Pemerintah. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder diperoleh dari laporan SBDK dari Otoritas Jasa Keuangan periode Januari 2014 – September 2019

### **Teknik Analisis Data**

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian model VAR. Dalam model ini setiap masing masing variabel diasumsikan simetris, karena sulit menentukan secara pasti apakah masing masing variabel tersebut bersifat eksogen atau endogen. Karena secara individual koefisien didalam model VAR sulit diinterpretasikan para ahli ekonometrika menggunakan *Impulse Respons* (Widardjono, 2009) Teknik analisis yang digunakan adalah properties model *Vector Auto Regression* (VAR), yaitu *Impulse Response Function* (IRF);

Dalam menggunakan program Eviews 10 Aplikasi model VAR mensyaratkan beberapa pengujian, antara lain: Uji Stasioneritas, Penentuan Lag Optimal, Uji Kausalitas Granger serta uji stabilitas. Indikator efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter diukur dengan:

1. Berapa kecepatan atau berapa jumlah tenggat waktu (*time lag*);
2. Berapa kekuatan variabel-variabel pada masing-masing jalur transmisi. Indikator tersebut diperoleh dari hasil Uji IRF

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**Analisis Statistik Metode VAR**

1. Uji Stationeritas

**Gambar 3. Uji Stationeritas Data BI Rate**

Null Hypothesis: D(RATE) has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob. *
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.891100	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.531592	
5% level	-2.905519	
10% level	-2.590262	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019)

Gambar 3 adalah hasil dari Uji Stasioneritas dari *BI Rate*. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa hasil dari p-value 0,0000 pada level *1<sup>st</sup> difference*, yang artinya nilai tersebut < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data dari *BI Rate* bersifat stasioner.

**Tabel 1. Uji Stationer Jenis SBDK**

Jenis Bank	Nilai <i>P-Value</i> dari Jenis SBDK					Kesimpulan
	Korporasi	Ritel	Mikro	KPR	Non KPR	
Bank Pemerintah	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stasioner
Bank Swasta	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stasioner
Bank Keseluruhan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stasioner

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019)

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari keseluruhan jenis SBDK dari semua jenis bank memiliki nilai p-value 0,000 pada level *1<sup>st</sup> difference*. Hal ini membuktikan bahwa semua data SBDK bersifat stasioner.

2. Uji Lag Optimal

Penentuan lag optimal sangat penting dalam melakukan analisis yang menggunakan metode VAR, karena dalam suatu variabel juga dipengaruhi dirinya sendiri selain variabel lain (Alfian, 2011). Pengaruh dari variabel terhadap dirinya sendiri tidak boleh terlalu lama maupun terlalu cepat karena apabila hal tersebut terjadi maka estimasi tidak dapat diandalkan.

Kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan besaran lag optimal diantaranya *Akaike Information Criterion (AIC)*, *Schwarz Information Criterion (SIC)*, *Hannan-Quinn Information Criterion (HQ)*, *Final Prediction Error (FPE)*, dan *Likelihood Ratio (LR)*.

Dalam menentukan lag optimal, lag yang terpilih adalah nilai lag yang memiliki bintang terbanyak dari kriteria lag optimal.

**Tabel 2. Uji Lag Optimal Suku Bunga Dasar Kredit**

Jenis SBDK	Hasil Kriteria Pengujian Lag Optimal					Kesimpulan
	LR	FPE	HQ	SC	AIC	
SBDK Korporasi	1	1	1	1	1	Lag Optimal pada periode 1
SBDK Ritel	1	1	9	1	1	Lag Optimal pada periode 1
SBDK Mikro	7	2	9	1	1	Lag Optimal pada periode 1
SBDK KPR	2	2	2	1	1	Lag Optimal pada periode 2
SBDK Non KPR	1	1	1	1	1	Lag Optimal pada periode 1

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019)

Tabel 2 menunjukkan hasil dari pengujian lag optimal dari SBDK Korporasi, Ritel, Mikro, KPR, dan Non KPR. Pada pengujian SBDK Korporasi memiliki nilai lag optimal 1, pada SBDK Ritel memiliki nilai lag optimal 1, pada SBDK Mikro memiliki nilai lag optimal 1, pada SBDK KPR memiliki nilai lag optimal 2, dan pada SBDK Non-KPR memiliki nilai lag optimal 1.

### 3. Uji Kausalitas Granger

Uji Kausalitas Granger digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat (kausalitas) diantara variabel variabel yang ingin diuji. Uji Kausalitas Granger pada penelitian ini menggunakan VAR *Pairwise Granger Causality Test*.

Dalam menentukan hasil dari Uji Kausalitas Granger harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Pada penelitian ini hipotesis adalah sebagai berikut :

H0 : Variabel tidak memiliki kausalitas dengan variabel tertentu.

H1 : Variabel mempunyai hubungan kausalitas dengan variabel tertentu.

Dalam pengambilan keputusan nya adalah sebagai berikut :

Jika p-value > alpha(0,05) maka H0 diterima

Jika p-value < alpha (0,05) maka H0 ditolak

\*R =Rate, P = Bank Pemerintah, S = Bank Swasta, T = Bank Total/ keseluruhan

**Tabel 3. Uji Kausalitas Granger**

VARIABEL	JENIS SBDK				
	SBDK KORPORASI	SBDK RITEL	SBDK MIKRO	SBDK KPR	SBDK NON KPR
R-P	0,0252	0,3556	0,0721	0,1102	0,0014
P-R	0,7107	0,3725	0,8108	0,993	0,3826
S-P	0,6748	0,0009	0,0314	0,1154	0,0029
P-S	0,0014	0,5007	0,0445	0,4212	0,1046
T-P	0,3872	0,0006	0,026	0,0449	0,004
P-T	1	0,0128	0,2567	0,0327	0,0052



Lanjutan Tabel 4. Uji Kausalitas Granger

VARIABEL	UJI KAUSALITAS GRANGER				
	JENIS SBDK				
	SBDK KORPORASI	SBDK RITEL	SBDK MIKRO	SBDK KPR	SBDK NON KPR
S-R	0,2185	0,9348	0,8106	0,368	0,841
R-S	0,0055	0,0429	0,0326	0,2725	0,0075
T-R	0,4235	0,543	0,7744	0,6733	0,4416
R-T	0,0006	0,267	0,0486	0,1329	0,0023
T-S	0,0582	0,4663	0,0106	0,3261	0,1262
S-T	4	0,0059	0,8534	0,0131	0,0021

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019)

Tabel 3 adalah hasil dari Uji Kausalitas Granger SBDK Korporasi. Dari hasil uji diatas dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki hubungan kausalitas dengan variabel lain memiliki *p-value* kurang dari 0,05 sehingga nanti dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak. Dengan ditolaknya  $H_0$  maka dapat dikatakan variabel tersebut akan mempengaruhi variabel lain.

Pada SBDK Korporasi, dapat dikatakan pada hubungan variabel *rate* dengan Pemerintah hanya *rate* yang mempengaruhi Pemerintah. Variabel Pemerintah mempengaruhi variabel swasta, namun swasta tidak mempengaruhi variabel Pemerintah. Variabel Total dan Pemerintah tidak memiliki hubungan kausalitas pada kedua belah pihak. Pada hubungan kedua variabel antara swasta dan *rate* dapat disimpulkan bahwa *rate* mempengaruhi swasta, namun swasta tidak mempengaruhi *rate*. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *rate* memiliki hubungan kausalitas yang mempengaruhi variabel total sedangkan variabel total tidak mempengaruhi variabel *rate*. Hubungan antara variabel total dengan variabel swasta tidak memiliki hubungan kausalitas pada kedua belah pihak variabel.

Pada SBDK Ritel, Variabel *rate* dengan Pemerintah tidak memiliki hubungan kausalitas, atau dapat dikatakan kedua variabel tidak mempengaruhi satu sama lain. Untuk variabel Pemerintah dan total, keduanya mempengaruhi satu sama lain. Untuk variabel Pemerintah dengan variabel swasta, variabel swasta berpengaruh terhadap variabel Pemerintah. Untuk variabel total dengan variabel *rate* keduanya tidak saling mempengaruhi. Untuk variabel swasta dan variabel *rate*, hanya variabel *rate* yang memiliki pengaruh terhadap variabel swasta. Pada variabel swasta dan variabel total, variabel swasta yang dapat mempengaruhi variabel total, sedangkan variabel total tidak memiliki pengaruh terhadap variabel swasta.

Pada SBDK Mikro, variabel *rate* dan variabel Pemerintah tidak memiliki hubungan kausalitas. Untuk variabel swasta dengan variabel Pemerintah memiliki hubungan saling mempengaruhi. Antara variabel total dan variabel Pemerintah, hanya variabel total yang mempengaruhi variabel Pemerintah. Untuk hubungan antar variabel swasta dengan variabel *rate*, hanya variabel *rate* yang mempengaruhi variabel swasta. Untuk hubungan antara variabel total dengan variabel *rate*, variabel *rate* memiliki pengaruh terhadap variabel total sedangkan variabel total tidak berpengaruh terhadap variabel *rate*. Pada variabel total dengan variabel swasta,

variabel total memiliki hubungan kausalitas yang dapat mempengaruhi variabel swasta.

Pada SBDK KPR, variabel *rate* dan variabel Pemerintah tidak terdapat hubungan kausalitas.. Untuk variabel swasta dengan variabel Pemerintah tidak memiliki hubungan kausalitas. Antara variabel total dan variabel Pemerintah, kedua variabel tersebut saling mempengaruhi. Untuk hubungan antar variabel swasta dengan variabel *rate*, kedua variabel ini tidak memiliki hubungan kausalitas atau dapat dikatakan tidak mempengaruhi satu sama lain. Untuk hubungan antara variabel total dengan variabel *rate*, kedua variabel ini tidak mempengaruhi satu sama lain. Pada variabel total dengan variabel swasta, kedua variabel tidak memiliki hubungan kausalitas yang dapat mempengaruhi satu sama lain.

Pada SBDK Non KPR, dapat disimpulkan bahwa variabel *rate* dan variabel Pemerintah terdapat hubungan kausalitas, namun hanya variabel *rate* yang dapat mempengaruhi variabel Pemerintah, Untuk variabel swasta dengan variabel Pemerintah hanya variabel swasta yang mempengaruhi variabel pemerintah, Antara variabel total dan variabel Pemerintah, kedua variabel mempengaruhi satu sama lain. Untuk hubungan antar variabel swasta dengan variabel *rate*, variabel *rate* lah yang mempengaruhi variabel swasta. Untuk hubungan antara variabel total dengan variabel *rate*, hanya variabel *rate* yang memiliki pengaruh terhadap variabel total. Pada variabel total dengan variabel swasta, variabel swasta memiliki pengaruh terhadap variabel total.

#### 4. Vector Auto Regression / VAR

**Tabel 5. Uji VAR**

Jenis SBDK	Nilai <i>Adj R-squared</i>			
	Pemerintah	Rate	Swasta	Total
SBDK Korporasi	0,966	0,9712	0,9623	0,8509
SBDK Ritel	0,9760	0,9716	0,9857	0,9863
SBDK Mikro	0,8350	0,9701	0,9741	0,965
SBDK KPR	0,9715	0,9730	0,9885	0,9872
SBDK Non KPR	0,647	0,9720	0,9653	0,8930

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2019)

Pada hasil implementasi VAR, *Adj. R-squared* atau koefisien determinasi menunjukkan peran masing-masing variabel dalam menjelaskan pengaruh variabel endogen lainnya. Pada SBDK Korporasi,  $R^2$  *Adjusted* dari variabel Pemerintah adalah 0,96668 yang artinya 96% perubahan suku bunga kredit Bank Pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel dalam model.  $R^2$  *Adjusted* dari variabel *rate* adalah sebesar 0,97152, artinya 97% perubahan suku bunga Bank Indonesia dapat dijelaskan oleh model variabel *rate*.  $R^2$  *Adjusted* dari variabel swasta adalah sebesar 0,963250, artinya 96% perubahan suku bunga kredit Bank Swasta dapat dijelaskan oleh variabel model.  $R^2$  *Adjusted* dari variabel total adalah sebesar 0,850929, artinya 85% perubahan suku bunga kredit Bank keseluruhan dapat dijelaskan oleh variabel model.

Pada SBDK Ritel,  $R^2$  *Adjusted* dari variabel Pemerintah adalah 0,9760 yang artinya 97% perubahan suku bunga kredit Bank Pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel dalam model.  $R^2$  *Adjusted* dari variabel *rate* adalah sebesar 0,9716, artinya

97% perubahan suku bunga Bank Indonesia dapat dijelaskan oleh model variabel *rate*.  $R^2$  Adjusted dari variabel swasta adalah sebesar 0,9857, artinya 98% perubahan suku bunga kredit Bank Swasta dapat dijelaskan oleh variabel model.  $R^2$  Adjusted dari variabel total adalah sebesar 0,9865, artinya 98% perubahan suku bunga kredit Bank keseluruhan dapat dijelaskan oleh variabel model.

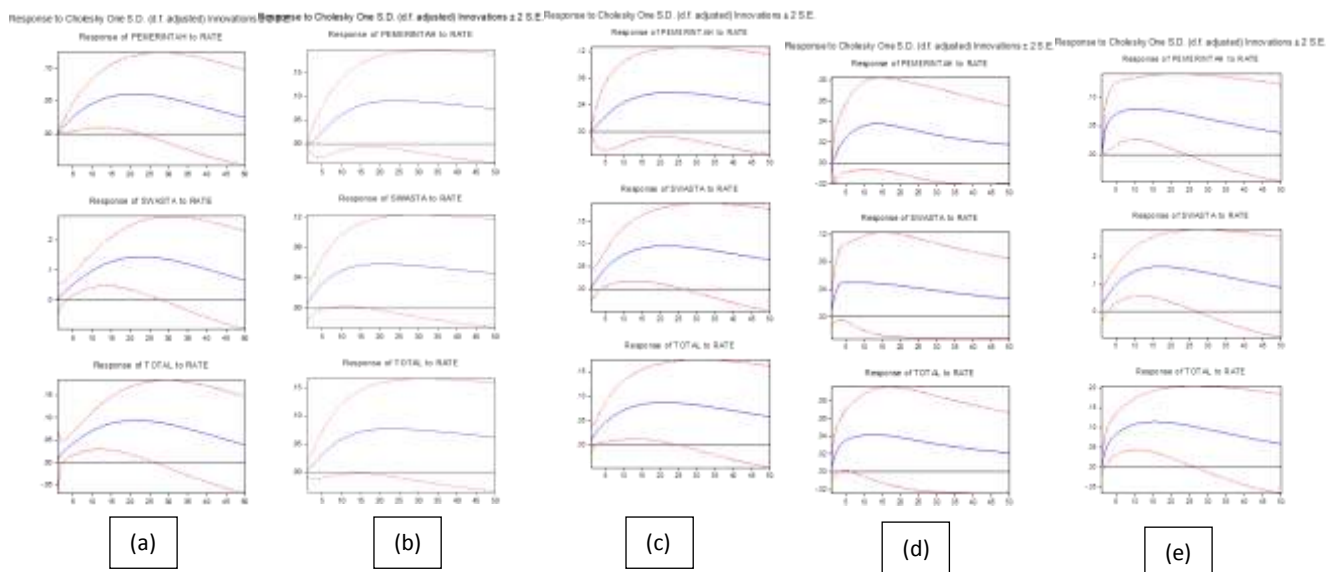
Pada SBDK Mikro.  $R^2$  Adjusted dari variabel Pemerintah adalah 0,8350 yang artinya 83% perubahan suku bunga kredit Bank Pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel dalam model.  $R^2$  Adjusted dari variabel *rate* adalah sebesar 0,9701, artinya 97% perubahan suku bunga Bank Indonesia dapat dijelaskan oleh model variabel *rate*.  $R^2$  Adjusted dari variabel swasta adalah sebesar 0,9741, artinya 97% perubahan suku bunga kredit Bank Swasta dapat dijelaskan oleh variabel model.  $R^2$  Adjusted dari variabel total adalah sebesar 0,9650, artinya 96% perubahan suku bunga kredit Bank keseluruhan dapat dijelaskan oleh variabel model.

Pada SBDK KPR.  $R^2$  Adjusted dari variabel Pemerintah adalah 0,9715 yang artinya 97% perubahan suku bunga kredit Bank Pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel dalam model.  $R^2$  Adjusted dari variabel *rate* adalah sebesar 0,9730, artinya 97% perubahan suku bunga Bank Indonesia dapat dijelaskan oleh model variabel *rate*.  $R^2$  Adjusted dari variabel swasta adalah sebesar 0,9880, artinya 98% perubahan suku bunga kredit Bank Swasta dapat dijelaskan oleh variabel model.  $R^2$  Adjusted dari variabel total adalah sebesar 0,9862, artinya 98% perubahan suku bunga kredit Bank keseluruhan dapat dijelaskan oleh variabel model.

Pada SBDK Non KPR.  $R^2$  Adjusted dari variabel Pemerintah adalah 0,6476 yang artinya 64% perubahan suku bunga kredit Bank Pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel dalam model.  $R^2$  Adjusted dari variabel *rate* adalah sebesar 0,9720, artinya 97% perubahan suku bunga Bank Indonesia dapat dijelaskan oleh model variabel *rate*.  $R^2$  Adjusted dari variabel swasta adalah sebesar 0,9653, artinya 96% perubahan suku bunga kredit Bank Swasta dapat dijelaskan oleh variabel model.  $R^2$  Adjusted dari variabel total adalah sebesar 0,8930, artinya 89% perubahan suku bunga kredit Bank keseluruhan dapat dijelaskan oleh variabel model.

### ***Impulse Response Function***

*Impulse response function* digunakan untuk menelusuri pengaruh kontemporer dari satu standar deviasi *shock* dari satu inovasi terhadap nilai-nilai variabel endogen saat ini atau nilai mendatang. Suatu *shock* dari variabel endogen langsung berpengaruh terhadap variabel itu sendiri dan juga diteruskan terhadap variabel endogen lainnya melalui struktur dinamis dari VAR.



Pada jenis SBDK Korporasi. Perubahan SBDK Bank Pemerintah terhadap shock BI Rate membutuhkan waktu 1 periode. Namun pergerakannya akan mulai normal pada periode ke-21. Pada SBDK Bank Swasta, perubahan SBDK terhadap shock BI7DRR membutuhkan waktu 1 periode. Pergerakan SBDK tersebut akan normal pada periode ke-23. Sedangkan untuk SBDK Korporasi Bank secara keseluruhan, perubahan SBDK untuk menyesuaikan dengan BI7DRR membutuhkan waktu selama 21 periode.

Pada jenis SBDK Ritel. Perubahan SBDK Bank Pemerintah terhadap perubahan BI Rate membutuhkan time lag 1 periode. Pergerakan SBDK Bank PEMERINTAH untuk menyesuaikan dengan pergerakan BI 7DRR akan optimal pada periode ke-24. Perubahan SBDK Bank Swasta akan optimal pada periode ke-21. Dan pada SBDK Bank secara total, akan optimal pada periode ke-23.

Pada jenis SBDK Mikro. Perubahan SBDK Bank Pemerintah terhadap shock BI Rate membutuhkan waktu 1 periode. Namun pergerakannya akan mulai normal pada periode ke-23. Pada SBDK Bank Swasta, respons Bank Swasta untuk merubah suku bunga membutuhkan waktu 1 periode dan akan optimal pada periode ke-22. Untuk respon perubahan suku bunga kredit bank secara keseluruhan terhadap perubahan BI 7 DRR membutuhkan waktu 1 periode dan akan optimal pada periode ke-21.

Pada jenis SBDK KPR. Respon bank Pemerintah untuk merubah suku bunga kredit agar sesuai dengan pergerakan BI 7 DRR membutuhkan time lag 2 periode. Perubahan tersebut akan optimal pada periode ke-14. Bank Swasta akan merubah suku bunganya sebagai respons untuk menyesuaikan dengan perubahan shock BI Rate. Respons Bank Swasta membutuhkan time lag selama 2 periode dan akan optimal pada periode ke-5. Untuk respons bank secara keseluruhan terhadap shock BI Rate membutuhkan waktu juga dan akan optimal pada periode yang ke 12.

Pada jenis SBDK Non KPR. Respon Bank Pemerintah dalam menyesuaikan suku bunga kredit terhadap shock BI Rate membutuhkan waktu 1 periode. Respon

tersebut akan optimal pada periode ke-12. Pada Bank Swasta respon perubahan suku bunga kredit dalam penyesuaian terhadap pergerakan BI Rate membutuhkan lag 1 periode. Namun pada pada periode tersebut suku bunga kredit Bank Swasta masih belum optimal. Suku bunga kredit Bank Swasta akan optimal pada periode yang ke-17. Pada bank secara keseluruhan, respons perubahan suku bunga terhadap shock BI Rate akan optimal pada periode ke-15.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu

1. Terdapat perbedaan *time lag* saat perubahan suku bunga kredit pada Bank Pemerintah dan Swasta agar optimal dengan perubahan dari *BI Rate*
2. Besaran *time lag* pada Bank Pemerintah pada SBDK Korporasi adalah 21 periode, Ritel 24 periode, Mikro 23 periode, KPR 14 periode dan Non KPR 12 periode.
3. Besaran *time lag* pada Bank Swasta pada SBDK Korporasi adalah 23 periode, Ritel 21 periode, Mikro 22 periode, KPR 5 periode, dan Non KPR 17 periode

### Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah di paparkan pada penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan pembaca maupun peneliti selanjutnya. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini bersifat *time series* dan dalam pengolahannya menggunakan metode VAR. Namun dalam pengolahan data *time series* tidak harus menggunakan metode VAR dalam mengolahnya. Hasil Analisa juga belum mempresentasikan keadaan perbankan di Indonesia secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan penulis menggunakan metode *sampling* atau belum menyeluruh dalam pengambilan datanya. Peneliti juga menyarankan untuk menggunakan objek periode dan bank yang berbeda sehingga peneliti selanjutnya dapat mendapatkan hasil yang lain.
2. Saran peneliti bagi perbankan pemerintah maupun swasta, penulis menyarankan untuk mempercepat proses perubahan suku bunga kredit. Dengan semakin cepat perubahan SBDK maka tingkat konsumsi investasi akan semakin baik. Perubahan tersebut akan meningkatkan kuantitas dari PDB. Dengan meningkatnya PDB maka inflasi dapat dikendalikan. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin optimal perubahan SBDK maka perekonomian akan semakin cepat diperbaiki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan. S. & Pratomo, W.A. 2013. *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Suku Bunga SBI Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter dan Variabel Makroekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No.12.
- Alfian, M. 2011. *Efektifitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Pada Jalur Suku Bunga Periode 2005:07-2010:06*. Media Ekonomi, Vol. 19, No. 2. 89-115.
- UU No. 3 Tahun 2004. Kebijakan Moneter
- Budiyanti, Eka. 2014. *Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Sektor Industri Manufaktur di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Desember 2014.

- Magdalena, I. & Pratomo, W.A. 2014. *Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2014.
- Rahmadian, R. & Wijayanto, P. 2013. *Mengukur Time Inconsistency Kebijakan Moneter di Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2013.  
BI.go.id  
OJK.go.id